

ABSTRAK

Yuli Herlina. 2022. 180102030086. *“Program Kartu Prakerja dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Telaga Silaba (Ditinjau dari Hak Konstitusional Warga Negara)”*. Skripsi, Program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah: (I) H. Bahran, SH, MH (II) Arie Sulistyoko, S.Sos., MH.

Kata Kunci: Program Kartu Prakerja, Kesejahteraan Masyarakat, Hak Konstitusional Warga Negara.

Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan dan insentif pasca pelatihan bagi para pencari kerja. Di tengah pandemi Covid-19, program Kartu Prakerja diprioritaskan untuk orang yang sudah bekerja dan pelaku usaha yang terdampak. Upaya yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan produktifitas serta daya saing mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan program Kartu Prakerja ini akan peneliti analisis dengan perspektif hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia.

Skripsi ini didasarkan pada riset lapangan di Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten HSU. Sumber data berupa enam informan serta dokumentasi. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan menganalisis secara deskriptif kualitatif.

Pemerintah menggunakan program Kartu Prakerja untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Para peserta program yang saya wawancarai meningkat kesejahteraannya selama program ini berjalan, yakni empat bulan. Mereka menerima uang insentif pelatihan sebesar Rp. 600.000,00 per bulannya. Namun setelah program ini selesai, para narasumber ini kebanyakan tidak mendapatkan pekerjaan baru atau memiliki usaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan. Para narasumber saya belum meningkatkan daya saing dan produktifitas mereka seperti keinginan pemerintah. Mereka rata-rata tidak begitu serius mengikuti pelatihan kerja online dan menggunakan uang insentif pelatihan untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan anak. Padahal pemerintah tidak hanya ingin meningkatkan daya beli peserta, tetapi juga ingin mereka menggunakan sebagian uang insentif untuk modal usaha atau modal mencari kerja. Yang banyak mendapat manfaat adalah orang yang membantu masyarakat untuk mendapatkan Kartu Prakerja atau bisa disebut joki. Masyarakat memberi mereka sebagian dari uang insentif pelatihan sebagai balasan untuk bantuan teknis yang mereka berikan. Para joki ini juga mengambil uang insentif survei untuk setiap peserta yang mereka bantu sebesar total Rp. 150.000,00. Di desa saya, merekalah yang paling disejahterakan oleh program ini.